

Katalog BPS : 2302004.53

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Indikator Pasar Tenaga Kerja Nusa Tenggara Timur Tahun 2014

ISBN : 978-602-70773-9-3

No. Publikasi : 53521.1504

Katalog BPS : 2302004.53

Ukuran Buku : 29,5 cm x 21,5 cm

Jumlah halaman : 58 halaman

Naskah : Angela R. M. Wea
Joni F. Nggili

Penyunting : Martin Suanta

Diterbitkan oleh : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode 2005-2010 dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Triwulan I, II, dan IV menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga sampel Triwulan III, juga 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen sehingga mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan series *Key Indicator of the Labour Market* (KILM) Triwulan I (Februari) dan Triwulan III (Agustus) Tahun 2014. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan oleh ILO, dengan harapan dapat dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai sistem kondisi pasar tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur. Informasi yang ditampilkan dalam publikasi ini mencakup penduduk usia kerja dirinci menurut jenis kelamin, daerah perkotaan dan pedesaan.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Kupang, April 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Anggoro Dwitjahyono

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim)	xi
Ringkasan Eksekutif	xii
1. Pendahuluan	1
1.1 Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2 Sakernas dan KILM	2
1.3 Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	4
1.4 Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	5
2. Penjelasan Teknis	7
2.1 Penjelasan Umum	7
2.2 Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja	10
2.2.1 Partisipasi di Dunia Kerja	11
2.2.2 Indikator Penduduk yang Bekerja	11
2.2.3 Indikator pengangguran, Setengah Pengangguran (Underemployment), dan Ketidakaktifan	14
2.2.4 Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	18
2.2.5 Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	19
2.2.6 Produktifitas Tenaga Kerja	20
2.2.7 Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	20
2.2.8 Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja, dan Distribusi Pendapatan	20
3. Partisipasi di Dunia Kerja (KILM 1)	21
4. Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7)	24
4.1 KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk	24
4.2 KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama ...	27
4.3 KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	30
4.4 KILM 5 Pekerja Paruh Waktu	33
4.5 KILM 6 Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja	35
4.6 KILM Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal	38
5. Indikator Pengangguran	40
5.1 KILM 8 Pengangguran	40
5.2 KILM 9 Pengangguran pada Kelompok Umur Muda	40
5.3 KILM 11 Pengangguran dan Pendidikan	43
5.4 KILM 12 Setengah Penganggur (Underemployment)	46
5.5 KILM 13 Tingkat Ketidakaktifan	49
6. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	50
KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2014	22
Tabel 2. Penduduk unur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2014	25
Tabel 3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Terhadap Total Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2014	26
Tabel 4. Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis kelaminm 2014	29
Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014	30
Tabel 6. Penduduk Umur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan utama dan Jenis Kelamin, 2014	33
Tabel 7. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2014	34
Tabel 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2014	37
Tabel 9. Penduduk Umur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (formal/Informal), 2014	40
Tabel 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (formal/Informal), 2014	40
Tabel 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2014	41
Tabel 12. Indikator Pengangguran Umur Muda di NTT, 2014	43
Tabel 13. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2014	45
Tabel 14. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan Menurut, 2014	47
Tabel 15. Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2014	48
Tabel 16. Indikator Setengah Penganggur, 2014	49
Tabel 17. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014	50
Tabel 18. Indikator Ketidakaktifan, 2014	51
Tabel 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2014	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, Februari dan Agustus 2014	21
Grafik 2. TPAK NTT Menurut Kabupaten/Kota, 2014	23
Grafik 3. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kab/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2014	31
Grafik 4. Share Perempuan Pada Pekerjaan Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, Agustus Tahun 2014	34
Grafik 5. Persentase Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Agustus Tahun 2014	35
Grafik 6. Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Kabupaten/Kota, Agustus Tahun 2014	37

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR ISTILAH DAN SUNGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicator of the Labor Market</i>
MDG's	Millenium Development Goals
OECD	Organisation For Economic Co-Operation and Development
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Survei Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014 mencapai 2,25 juta orang. Jumlah tersebut turun sebanyak 0,14 juta orang dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 yang sebesar 2,39 juta orang.

Menurunnya jumlah angkatan kerja berpengaruh pada menurunnya persentase TPAK dari 74,04 persen pada Februari 2014 menjadi 68,91 persen pada Agustus 2014 yaitu menurun sebesar 5,13 poin.

Angka EPR NTT pada Agustus 2014 sebesar 66,67 persen. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 67 orang yang bekerja pada Agustus 2014. EPR ini mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Februari 2014 sebesar 72,58 persen.

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2014 mempunyai distribusi yang tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Februari 2014). Persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status pekerja keluarga/tak dibayar (28,94 persen; 0,6 juta orang), diikuti dengan penduduk bekerja dengan Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (28,22 persen; 0,6 juta orang) dan urutan terakhir adalah buruh / karyawan / pegawai (19,59 persen; 0,4 juta orang).

Kondisi lapangan pekerjaan utama di NTT pada Agustus 2014 memperlihatkan bahwa menurut tiga sektor besar yaitu Pertanian, Jasa-jasa

dan Manufaktur, Sektor Pertanian masih mendominasi dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor ini sebesar 60,77 persen, urutan kedua ditempati oleh sektor Jasa-Jasa sebesar 26,83 persen, dan disusul sektor Manufaktur sebesar 12,40 persen.

Tingkat Pekerja Paruh Waktu di NTT pada Agustus 2014 mencapai 37,44 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 37 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami peningkatan sebesar 1,43 poin dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 yang sebesar 36,01 persen). Tingkat pekerja paruh waktu perempuan mengalami peningkatan dibandingkan laki-laki, yaitu 48,81 persen dan 28,75 persen.

Dilihat menurut jam kerja, sebagian besar penduduk (65,92 persen) bekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam per minggu pada Agustus 2014 atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Februari 2014 (65,88 persen), sedangkan hanya sekitar satu pertiga dari total penduduk yang bekerja dengan jam kerja diatas 35 jam per minggu.

Dari 2.174.228 orang yang bekerja, 78,91 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (1.715.674 orang). Pada periode Februari 2014 dan Agustus 2014 tampak adanya penurunan persentase penduduk bekerja di sektor informal, sesuai dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Februari 2014 sebesar 81,35 persen, turun menjadi 78,91 persen pada Agustus 2014, sedangkan persentase sektor formal pada Februari 2014 mencapai

18,65 persen, dan naik hingga mencapai 21,09 persen pada Agustus 2014.

TPT pada Agustus 2014 sebesar 3,26 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di NTT, terdapat sebanyak 3 orang yang masuk kategori penganggur. TPT NTT pada Agustus 2014 mengalami kenaikan 1,29 poin bila dibandingkan Februari 2014 yang sebesar 1,97 persen.

TPT Agustus 2014 dari penduduk pada kelompok umur muda (15-24 tahun) mencapai 11,12 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 11 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 5,71 poin bila dibandingkan Februari 2014.

TPT Agustus 2014 menurut tingkat pendidikan tertinggi pada mereka dengan pendidikan tinggi yaitu 8,49 persen, sementara yang terendah pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT 0,49 persen.

Setengah penganggur di NTT Agustus 2014 mencapai 1.063.028 orang, terdiri dari 503.778 orang laki-laki dan 559.250 orang perempuan. Menurut klasifikasi desa-kota, jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 986.468 orang, sementara di perkotaan hanya 76.560 orang.

Tingkat ketidakaktifan penduduk usia kerja di NTT, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 31,09 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja di NTT, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 31 orang. Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2014 meningkat sebesar 5,13 poin dibandingkan dengan keadaan Februari 2014.

PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di NTT. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di NTT, BPS sejak Triwulan I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of The Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1 SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, ketepatan, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Khusus pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Tujuan umum pengumpulan data dalam Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten /kota, provinsi, maupun nasional.

Selama periode Februari 2011-Agustus 2014, Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah tangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumah tangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus di seluruh provinsi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Dari 20.000 blok sensus tersebut, diantaranya 5.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas Triwulan III dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan/komplemen. Penambahan jumlah sampel ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan keadaannya umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja. Keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja.

1.2 SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, SUPAS, dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan, sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan beberapa data penting lainnya. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari

masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3) Faktor Pengendali/Penimbang

Data ketenagakerjaan pada Februari, Mei, dan Agustus 2014 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/ pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011, petugas sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat /pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan SUPAS berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musim.

Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan, dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, maka perlu disusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator ketenagakerjaan, untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Statistik berbagai negara.

1.3 PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan agenda ILO: pekerjaan yang layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan dan keamanan. Menerapkan konsep “layak” untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain. Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerjaan rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/ *exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja disektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan *Milennium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu “mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda”. Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan,

tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktifitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Perempuan menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Sebagai contoh, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktifitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudah dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran "hanya" merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi

situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan, misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisis apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu dibandingkan dengan

total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

2. PENJELASAN TEKNIS

Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

2.1. PENJELASAN UMUM

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku *"Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under Employment: An ILO Manual on Concepts and Methods"*, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di NTT dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik NTT.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*). Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis NTT selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada

periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial seperti berorganisasi, kerja bakti).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah / gaji / pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka

mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh / karyawan / pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi / kondisi / iklim / musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2. INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan KILM pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia. Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran), KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja. Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

2.2.2. INDIKATOR PENDUDUK YANG BEKERJA

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK). Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat

disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh / karyawan / pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian / publikasi, digunakan kategori / sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: **A (Agriculture)**/Sektor Pertanian, **M (Manufacture)**/Sektor Manufaktur dan **S (Services)**/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima

pekerjaan lain. Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika, dan El Salvador. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja (*The International Conference of Labour Statisticians - ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja pada setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator ini sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal. ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih. Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di

usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal / informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan / jabatan.

2.2.3 INDIKATOR PENGANGGURAN, SETENGAH PENGANGGURAN (UNDER EMPLOYMENT), DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung berkorelasi. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian

(*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, **bukan** jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM12. Setengah Penganggur (*Under Employment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan $100 - \text{TPAK}$.

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF KILM

14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi). Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15-24 tahun), pemuda (16-30 tahun), dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah) yang bukan merupakan bagian dari Sakernas yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/ pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di NTT, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PENDUDUK BEKERJA, DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

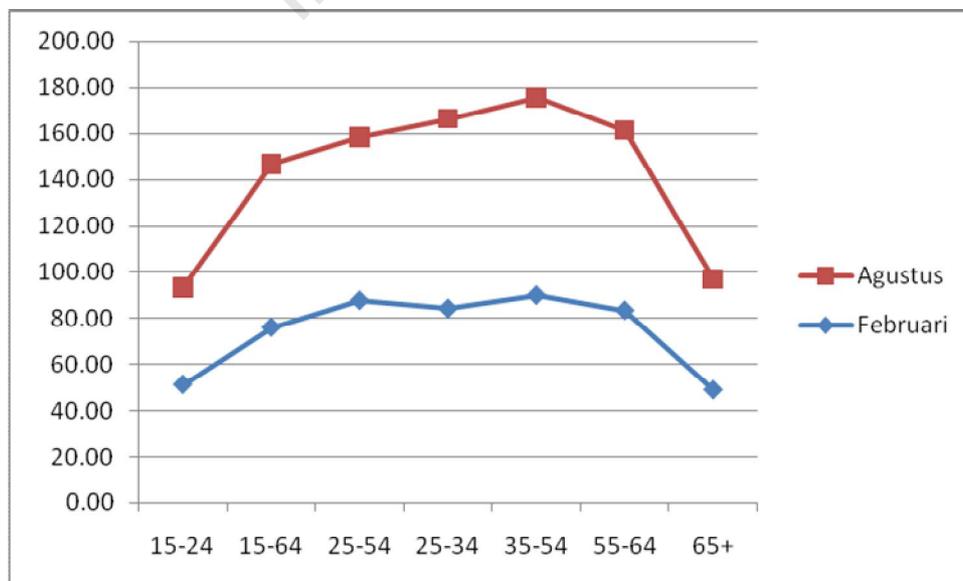
3. PARTISIPASI DALAM DUNIA KERJA (KILM 1)

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja pada Agustus 2014 mencapai 2,25 juta orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 0,14 juta orang dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 (2,39 juta orang), lihat Lampiran 3. Menurunnya jumlah angkatan kerja juga berpengaruh pada menurunnya persentase TPAK dari 74,04 persen pada Februari 2014 menjadi 68,91 persen pada Agustus 2014 atau mengalami penurunan sebesar 5,13 persen poin.

Biasanya TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran tersebut terlihat pada keadaan Agustus 2014, dimana TPAK laki-laki mencapai 80,00 persen sementara pada perempuan hanya 58,33 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 80 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 58 orang yang termasuk angkatan kerja. Pola yang sama juga terjadi pada Februari 2014, dimana TPAK laki-laki (82,88 persen) lebih tinggi dibanding TPAK perempuan (65,60 persen).

Pada Tabel 1 dapat kita lihat bahwa Sakernas periode Februari dan Agustus 2014 terjadi fluktuasi TPAK pada semua kelompok umur dan penurunan terbesar adalah pada kelompok umur 65+ yaitu menurun sebesar 1,01 persen poin. Grafik 1 menunjukkan pola TPAK menurut kelompok umur 5 tahunan, TPAK terlihat meningkat seiring dengan peningkatan umur dan menurun pada kelompok umur 55-64 tahun dan 65 tahun keatas.

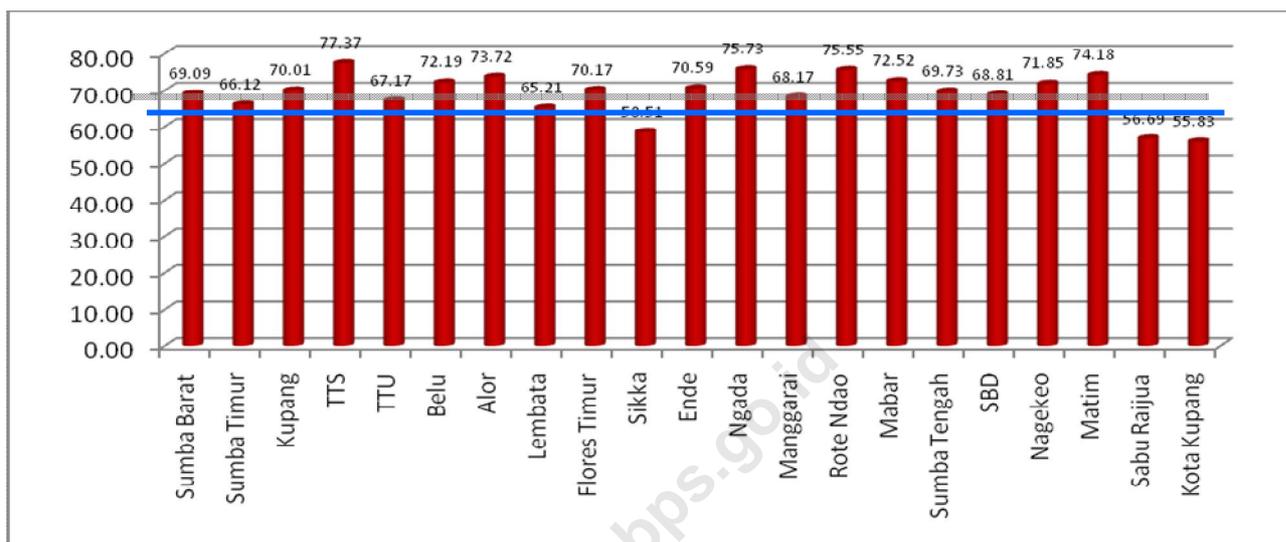


Grafik 1. TPAK NTT Menurut Kelompok Umur, Februari dan Agustus 2014

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Kelompok Umur (Persen), Tahun 2014

Kelompok Umur	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
Total	74,04	68,91
Laki-laki	82,88	80,00
Perempuan	65,60	58,33
Perkotaan	61,68	58,31
Pedesaan	77,21	71,64
15-24 Tahun	51,13	41,89
Laki-laki	58,35	49,49
Perempuan	43,66	33,97
Perkotaan	33,88	27,93
Pedesaan	56,26	46,05
15-64 Tahun	76,16	70,63
Laki-laki	84,28	81,27
Perempuan	68,40	60,40
Perkotaan	64,08	60,12
Pedesaan	79,32	73,39
25-54 Tahun	87,76	70,63
Laki-laki	97,30	81,27
Perempuan	78,96	60,40
Perkotaan	80,36	60,12
Pedesaan	89,63	73,39
25-34 Tahun	84,28	82,19
Laki-laki	95,92	96,12
Perempuan	73,49	69,18
Perkotaan	77,08	78,71
Pedesaan	86,21	83,13
35-54 Tahun	90,01	85,73
Laki-laki	98,20	98,16
Perempuan	82,47	74,37
Perkotaan	82,65	79,43
Pedesaan	91,78	87,25
55-64 Tahun	83,47	77,84
Laki-laki	90,57	89,89
Perempuan	76,91	66,27
Perkotaan	73,42	60,79
Pedesaan	85,63	81,54
65+	48,83	47,82
Laki-laki	66,06	63,59
Perempuan	32,89	34,04
Perkotaan	26,98	31,04
Pedesaan	53,31	51,22

TPAK menurut kabupaten/kota pada Agustus 2014 menunjukkan bahwa TPAK tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (77,37 persen), Kabupaten Ngada (75,73 persen) dan Kabupaten Rote Ndao (75,55 persen). TPAK tersebut berada di atas TPAK NTT yang hanya sebesar 68,91 persen. Kabupaten/kota dengan TPAK terendah pada Agustus 2014 ini diduduki oleh Kota Kupang (55,83 persen), Kabupaten Sabu Raijua (56,69 persen), dan Kabupaten Sikka (58,51 persen).



Keterangan : ———— : ———— TPAK Provinsi NTT

Grafik 2. TPAK NTT Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2014

4. INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)

4.1. KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR)

Salah satu indikator penting dalam pasar kerja adalah EPR, pada Agustus 2014 sebesar 66,67 persen. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 67 orang yang bekerja pada Agustus 2014. EPR ini mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Februari 2014 yang sebesar 72,58 persen. Dilihat berdasarkan jenis kelamin EPR laki-laki lebih tinggi sekitar 3.61 kali dibandingkan EPR perempuan pada periode Februari 2014 dan Agustus 2014. Sebagai contoh pada Agustus 2014, EPR laki-laki pada periode ini adalah sebesar 77,42 persen sedangkan EPR perempuan hanya sebesar 56.40 persen.

Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Agustus 2014 EPR daerah perkotaan (53,62 persen) lebih rendah dibanding EPR daerah perdesaan (70,02 persen). Begitu pula untuk periode Februari 2014, EPR wilayah perkotaan lebih rendah dibanding wilayah perdesaan. EPR daerah perkotaan periode Februari dan Agustus 2014 mengalami penurunan, yaitu menurun sebesar 4,4 poin, demikian pula untuk wilayah perdesaan juga mengalami penurunan sebesar 6,3 poin.

Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, EPR penduduk kelompok umur muda (kelompok umur 15–24 tahun), pada periode Februari dan Agustus 2014 menurun sebesar 11,14 poin dari 48,37 persen menjadi 37,23 persen. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk kelompok dewasa (umur 25 tahun ke atas), pada periode Februari dan Agustus 2014 EPR penduduk umur dewasa juga mengalami penurunan yaitu menurun sebesar 3,71 poin, dari 82,07 persen menjadi 78,36 persen.

Tabel 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur, Tahun 2014

Kelompok Umur	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
Umur 15 Tahun ke Atas	3.218.824	3.261.339
Laki-laki	1.571.291	1.592.960
Perempuan	1.647.533	1.668.379
Perkotaan	657.504	667.059
Pedesaan	2.561.320	2.594.280
Umur Muda (15-24 Tahun)	906.280	927.139
Laki-laki	461.158	473.204
Perempuan	445.122	453.935
Perkotaan	207.707	212.777
Pedesaan	698.573	714.362
Umur Dewasa (25+)	2.312.544	2.334.200
Laki-laki	1.110.133	1.119.756
Perempuan	1.202.411	1.214.444
Perkotaan	449.797	454.282
Pedesaan	1.862.747	1.879.918
Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja	2.336.212	2.174.228
Laki-laki	1.273.213	1.233.196
Perempuan	1.062.999	941.032
Perkotaan	381.486	357.667
Pedesaan	1.954.726	1.816.561
Umur Muda (15-24 Tahun) yang Bekerja	438.325	345.183
Laki-laki	254.330	208.439
Perempuan	183.995	136.744
Perkotaan	59.003	45.524
Pedesaan	379.322	299.659
Umur Dewasa (25+) yang Bekerja	1.897.887	1.829.045
Laki-laki	1.018.883	1.024.757
Perempuan	879.004	804.288
Perkotaan	322.483	312.143
Pedesaan	1.575.404	1.516.902

Tabel 3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, Tahun 2014

Kelompok Umur	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
Umur 15 Tahun ke Atas	72,58	66,67
Laki-laki	81,03	77,42
Perempuan	64,52	56,40
Perkotaan	58,02	53,62
Pedesaan	76,32	70,02
Umur Muda (15-24 Tahun)	48,37	37,23
Laki-laki	55,15	44,05
Perempuan	41,34	30,12
Perkotaan	28,41	21,40
Pedesaan	54,30	41,95
Umur Dewasa (25+)	82,07	78,36
Laki-laki	91,78	91,52
Perempuan	73,10	66,23
Perkotaan	71,70	68,71
Pedesaan	84,57	80,69

4.2. KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Distribusi persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2014 ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Februari 2014). Persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status Wiraswasta (51,47 persen; 1.119.111 orang), diikuti dengan penduduk bekerja dengan pekerja keluarga (28,94 persen; 629.122 orang) dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai) (19,59 persen; 425.995 orang) sebagaimana pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Pada Tabel 4, penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri meningkat sebesar 4,73 poin dari sebesar 13,97 persen pada Februari 2014 menjadi sebesar 18,70 persen untuk periode Agustus 2014. Untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 2,27 persen poin, sedangkan penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas dan pekerja keluarga mengalami penurunan, masing-masing sebesar 2,12 poin untuk pekerja bebas dan 5,49 poin untuk pekerja keluarga.

Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment*, pada Agustus 2014 mencapai 50,69 persen, hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 50 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 persentase pekerja rentan terus mengalami penurunan sebesar 2,87 poin. Keadaan pekerja rentan menurut jenis kelamin pada Februari 2014 dan Agustus 2014 menunjukkan bahwa pekerja rentan perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan pekerja rentan laki-laki, sebagai fakta pada Agustus 2014 ini persentase pekerja rentan perempuan sebesar 66,97 persen dan pekerja rentan laki-laki sebesar 38,26 persen atau pekerja rentan perempuan lebih besar 1,75 kali daripada pekerja rentan laki-laki.

Tabel 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin, 2014

Status Pekerjaan Utama (1)	Februari		Agustus	
	Absolut (2)	% (3)	Absolut (4)	% (5)
Laki-laki dan Perempuan	2.336.212	100,00	2.174.228	100,00
a. Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	404.766	17,33	425.995	19,59
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	1.018.481	48,25	1.119.111	51,47
i. Pengusaha	680.096	29,11	646.146	29,72
ii. Berusaha sendiri	326.297	13,97	406.542	18,70
iii. Pekerja bebas	12.088	5,17	66.423	3,06
c. Pekerja keluarga	804.173	34,42	629.122	28,94
d. Pekerja "rentan" (ii+iii+c)	1.251.350	53,56	1.102.087	50,69
Laki-laki	1.273.213	100,00	1.233.196	100,00
a. Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	262.979	20,65	266.849	21,64
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	319.499	61,17	778.626	63,14
i. Pengusaha	78.890	42,27	494.514	40,10
ii. Berusaha sendiri	168.974	13,27	233.991	18,97
iii. Pekerja bebas	71.635	5,63	50.121	4,06
c. Pekerja keluarga	231.447	18,18	187.721	15,22
d. Pekerja "rentan" (ii+iii+c)	472.056	37,08	471.833	38,26
Perempuan	1.062.999	100,00	941.032	100,00
a. Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	141.787	13,34	159.146	16,91
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	348.486	32,78	340.485	36,18
i. Pengusaha	141.918	13,35	151.632	16,11
ii. Berusaha sendiri	157.323	14,80	172.551	18,34
iii. Pekerja bebas	49.245	4,63	16.302	1,73
c. Pekerja keluarga	572.726	53,88	441.401	46,91
d. Pekerja "rentan" (ii+iii+c)	779.294	73,31	630.254	66,97

Tabel 5. Presentasi Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin

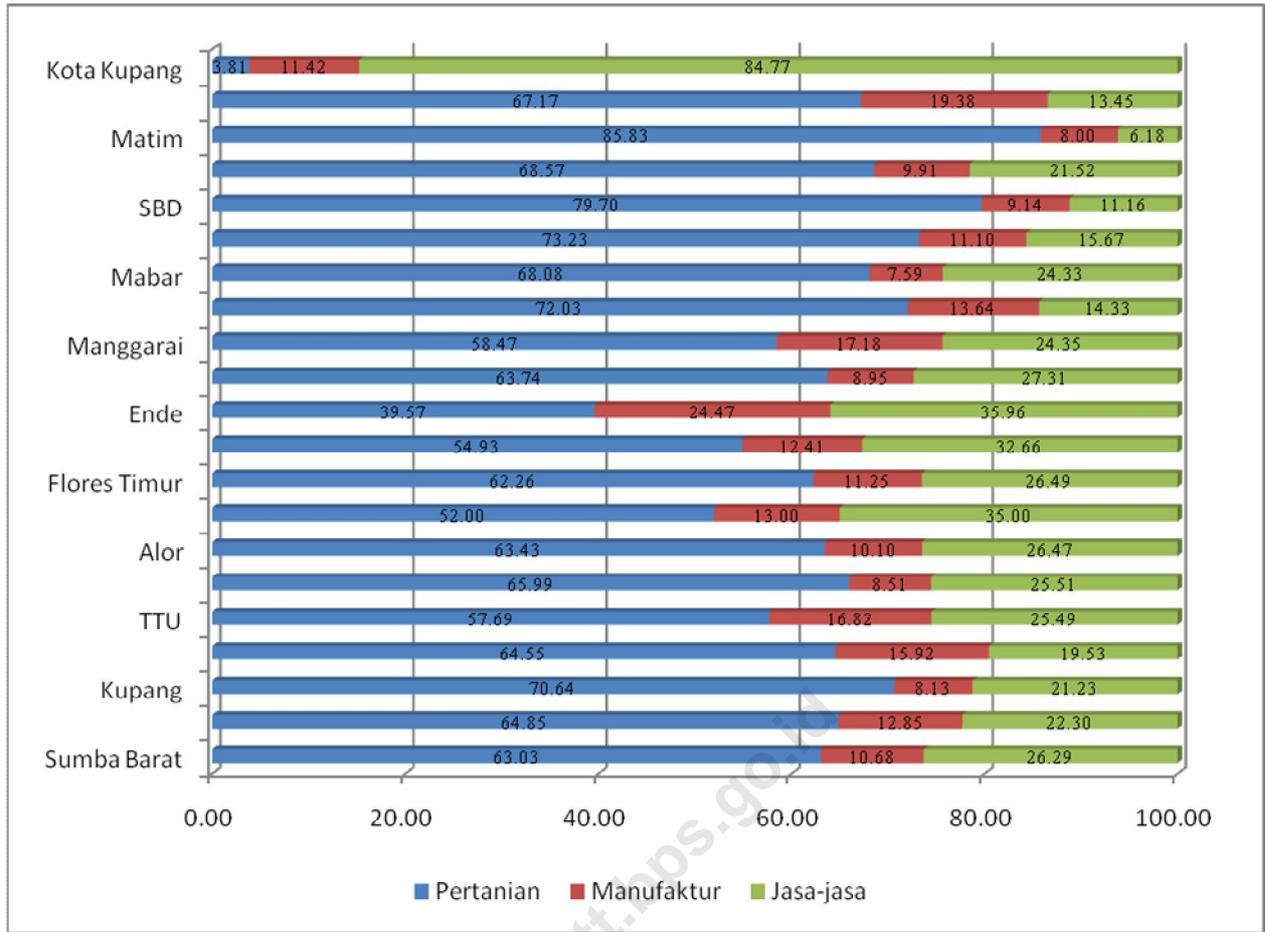
Status Pekerjaan Utama	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
Laki-laki dan Perempuan	2.336.212	2.174.228
Berusaha sendiri	326.297	406.542
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	649.104	613.587
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	30.992	32.559
Buruh/karyawan/pegawai	404.766	425.995
Pekerja bebas di pertanian	66.712	29.326
Pekerja bebas di non pertanian	54.168	37.097
Pekerja keluarga/tak dibayar	804.173	629.122
Laki-laki	1.273.213	1.233.196
Berusaha sendiri	168.974	233.991
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	510.320	465.665
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	27.858	28.849
Buruh/karyawan/pegawai	262.979	266.849
Pekerja bebas di pertanian	25.468	15.246
Pekerja bebas di non pertanian	46.167	34.875
Pekerja keluarga/tak dibayar	231.447	187.721
Perempuan	1.062.999	941.032
Berusaha sendiri	157.323	172.551
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	138.784	147.922
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3.134	3.710
Buruh/karyawan/pegawai	141.787	159.146
Pekerja bebas di pertanian	41.244	14.080
Pekerja bebas di non pertanian	8.001	2.222
Pekerja keluarga/tak dibayar	572.726	441.401

4.3. KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Pada Agustus 2014 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di NTT masih didominasi oleh sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan sebesar persen 70.00 (1.321.274 orang), urutan kedua ditempati oleh sektor jasa-jasa sebesar 19.67 persen (371.231 orang), dan disusul sektor manufaktur sebesar 10,34 persen (195.087 orang).

Apabila dilihat lebih lanjut, penyumbang terbesar dari sektor manufaktur adalah sektor industri 8,80 persen. Sedangkan untuk sektor jasa-jasa penyumbang terbesarnya adalah sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi dan sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan dengan persentase masing-masing sebesar 9,41 persen dan 4,81 persen.

Periode Februari dan Agustus 2014 menunjukkan sedikit perubahan, dimana sektor jasa-jasa menurun sebesar 3.71 persen poin, sektor manufaktur mengalami kenaikan sebesar 3,03 persen poin sedangkan sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan juga mengalami kenaikan sebesar 0.69 persen poin. Komposisi sektoral pada Agustus 2014 menurut kabupaten menunjukkan bahwa kabupaten dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah kabupaten Sumba Barat Daya (79,70 persen), kabupaten dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor manufaktur adalah kabupaten Ende (24,47 persen) dan kabupaten dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor jasa-jasa adalah Kota Kupang (84,77 persen).



Grafik 3. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2014

Tabel 6. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Lapangan Pekerjaan Umum	Februari		Agustus	
	Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	2.336.212	100,00	2.174.228	100,00
a. Pertanian	1.519.547	65,04	1.321.274	60,77
b. Manufaktur	229.188	9,81	269.599	12,40
i. Pertambangan	29.823		19.050	
ii. Industri	114.685		166.194	
iii. Listrik, gas dan air	6.840		5.038	
iv. Bangunan	77.840		79.317	
c. Jasa-jasa	587.477	25,15	583.355	26,83
i. Perdagangan	198.998		177.571	
ii. Transportasi	100.204		90.815	
iii. Keuangan	18.697		23.528	
iv. Jasa Kemasyarakatan	269.578		291.441	
Laki-laki	1.273.213	100,00	1.233.196	100,00
a. Pertanian	819.218	64,34	751.251	60,92
b. Manufaktur	125.135	9,83	142.643	11,57
i. Pertambangan	19.980		14.896	
ii. Industri	22.599		46.108	
iii. Listrik, gas dan air	6.840		4.805	
iv. Bangunan	75.716		76.834	
c. Jasa-jasa	328.860	25,83	339.302	27,51
i. perdagangan	66.922		79.224	
ii. transportasi	98.184		87.759	
iii. Keuangan	13.222		15.358	
iv. Jasa Kemasyarakatan	150.532		156.961	
Perempuan	1.062.999	100,00	941.032	100,00
a. Pertanian	700.329	65,88	570.023	60,57
b. Manufaktur	104.053	9,79	126.956	13,49
i. Pertambangan	9.843		4.154	
ii. Industri	92.086		120.086	
iii. Listrik, gas dan air	0		233	
iv. Bangunan	2.124		2.483	
c. Jasa-jasa	258.617	24,33	244.053	25,93
i. perdagangan	132.076		98.347	
ii. transportasi	2.020		3.056	
iii. Keuangan	5.475		8.170	
iv. Jasa Kemasyarakatan	119.046		134.480	

4.4. KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

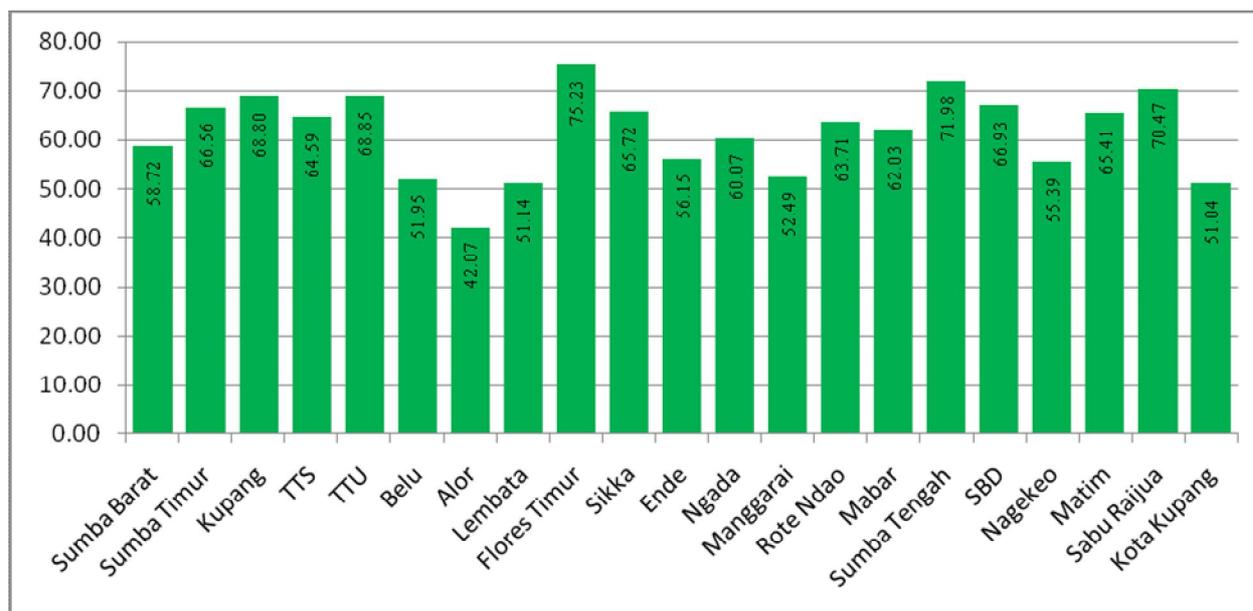
Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

Pada Agustus 2014, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 37,44 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 37 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami peningkatan sebesar 1,43 poin dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 (36,01 persen). Pada Agustus 2014 tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 28,75 persen untuk pekerja paruh waktu laki-laki dan 48,81 persen untuk pekerja paruh waktu perempuan (Tabel 8).

Pada Agustus 2014, tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Kabupaten Lembata (22,63 persen), posisi kedua diduduki oleh Kabupaten Manggarai (19,36 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Kabupaten Sumba Barat Daya (16,70 persen). Untuk kabupaten dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah pada Agustus 2014 terdapat pada Kota Kupang (2,20 persen), Kabupaten Timor Tengah Selatan (5,63 persen) dan Kabupaten Manggarai Timur (5,68 persen) sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 5.

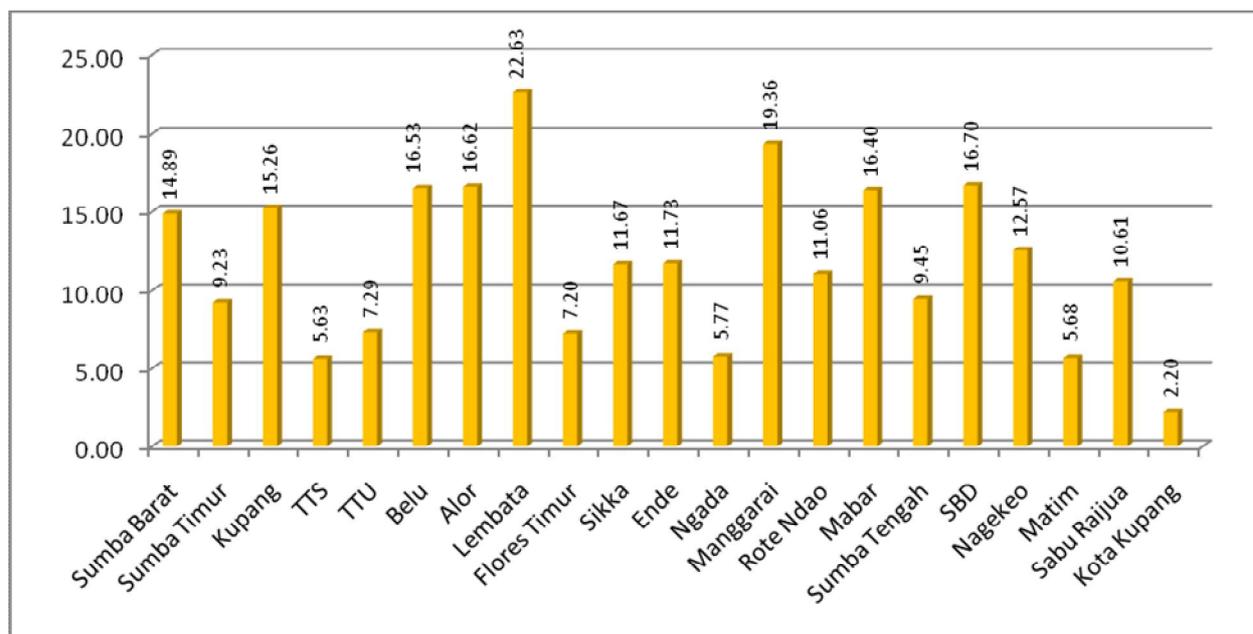
Tabel 7. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (Persen), 2014

Indikator	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
Tingkat Pekerja Paruh Waktu	36,01	37,44
a. Laki-laki	26,26	28,75
b. Perempuan	47,69	48,81
c. Perkotaan	19,32	16,21
d. Perdesaan	39,27	41,62
Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	60,26	56,44



Grafik 4. *Share* Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, Agustus Tahun 2014

Share perempuan pada pekerja paruh waktu pada Agustus 2014 mencapai 56,44 persen, atau dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 56 orang diantaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu pada Agustus 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, dengan penurunan sebesar 3,82 poin (Tabel 8). Grafik 4 menunjukkan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu menurut kabupaten. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa kabupaten dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu tertinggi pada Agustus 2014 terdapat di Kabupaten Flores Timur (75,23 persen), Kabupaten Sumba Tengah (71,98 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua (70,47 persen). Sebaliknya kabupaten dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu terendah pada Agustus 2014 secara berturut-turut diduduki oleh Kabupaten Alor sebesar 42,07 persen, Kota Kupang sebesar 51,04 persen, dan Kabupaten Manggarai sebesar 52,49 persen.



Grafik 5. Persentase Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Agustus Tahun 2014

4.5. KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

Pada Agustus 2014, penduduk yang bekerja di atas 35 jam per minggu mencapai hampir dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Agustus 2014 mencapai 65,92 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,04 poin jika dibandingkan dengan Februari 2014 (65,88 persen).

Dapat dicermati pula pada Tabel 9, pada periode Februari dan Agustus 2014 secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Pada Agustus 2014, persentase penduduk perempuan yang memiliki jam kerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 75,05 persen, sementara persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 58,96 persen.

Apabila kita amati, terdapat perbedaan karakteristik menurut jam kerja antara penduduk yang bekerja di perdesaan dan di perkotaan. Penduduk di perdesaan lebih banyak bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Hal tersebut terjadi baik pada Februari dan Agustus 2014. Pada Agustus 2014 persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah perdesaan mencapai 71,31 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 38,56 persen.

Persentase tertinggi penduduk bekerja pada Agustus 2014 berdasarkan jam kerja terdapat pada kelompok jam kerja 35–44 jam per minggu yaitu mencapai 22,49 persen. Akan tetapi masih banyak pula penduduk yang bekerja di atas 44 jam per minggu yaitu sekitar 11,69

persen. Apabila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan maka persentase laki-laki yang bekerja di atas 44 jam per minggu cenderung lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sebagai gambaran pada Agustus 2014, persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 44 jam per minggu sebesar 8,43 persen, sementara persentase penduduk laki-laki yang bekerja di atas 44 jam per minggu mencapai 14,18 persen.

Tabel 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Tahun 2014

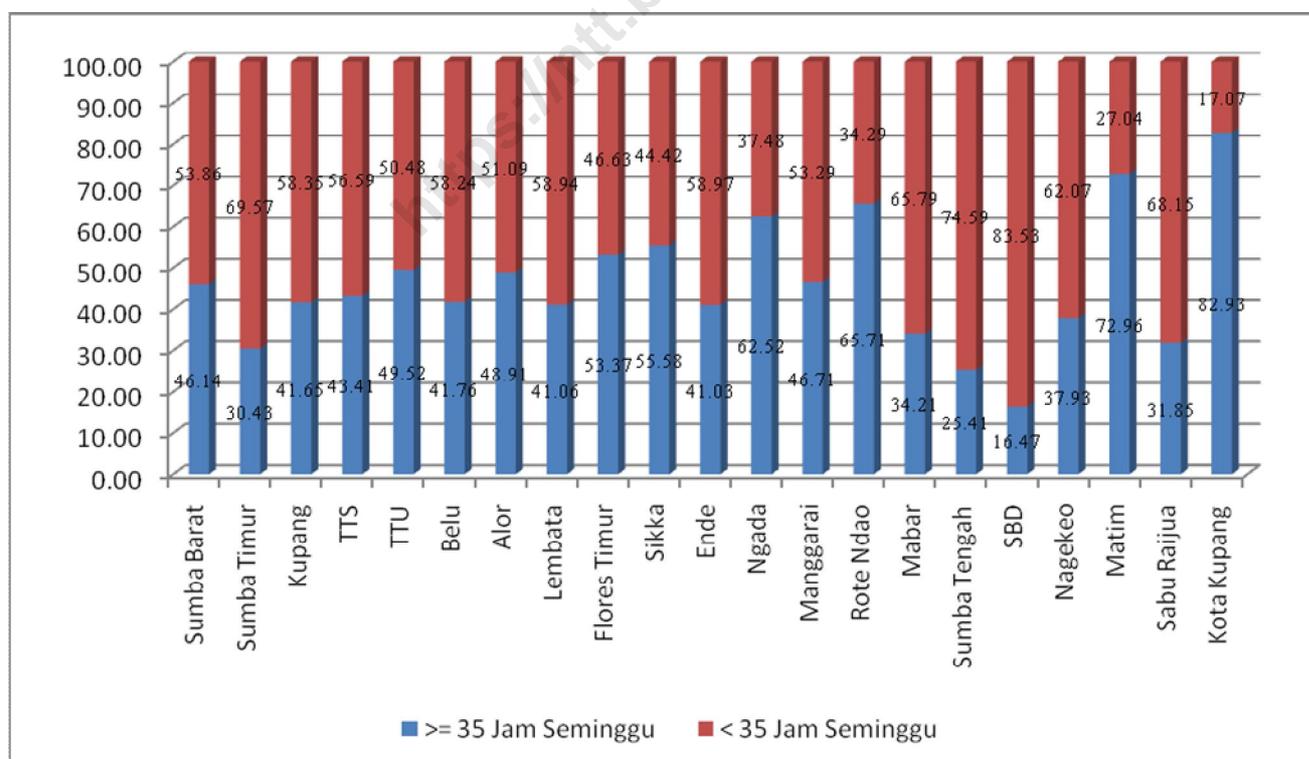
Jumlah Jam Kerja	Februari	Agustus
Total	100,00	100,00
0 *)	2,58	3,77
1-9	9,51	11,22
10-14	18,35	17,84
15-24	20,68	19,83
25-34	14,76	13,26
35-44	22,64	22,39
45-59	6,28	6,11
60+	5,20	5,58
1. Laki-laki	100,00	100,00
0 *)	2,70	4,01
1-9	6,94	7,84
10-14	13,90	13,95
15-24	18,62	19,06
25-34	15,74	14,09
35-44	28,32	26,86
45-59	8,21	7,58
60+	5,58	6,60
2. Perempuan	100,00	100,00
0 *)	2,44	3,45
1-9	12,59	15,65
10-14	23,69	22,93
15-24	23,16	20,85
25-34	13,59	12,17
35-44	15,84	16,52
45-59	3,96	4,18
60+	4,73	4,25

*0 jam : Sementara tidak bekerja

Tabel 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Tahun 2014 (Lanjutan)

Jumlah Jam Kerja	Februari	Agustus
1. Perkotaan	100,00	100,00
0 *)	5,45	4,56
1-9	6,49	4,98
10-14	10,70	7,08
15-24	12,29	9,34
25-34	13,16	12,59
35-44	29,23	32,60
45-59	9,78	11,81
60+	12,89	17,03
2. Pedesaan	100,00	100,00
0 *)	2,02	3,61
1-9	10,10	12,45
10-14	19,85	19,96
15-24	22,32	21,90
25-34	15,07	13,39
35-44	21,35	20,38
45-59	5,60	4,99
60+	3,69	3,33

0* jam : Sementara tidak bekerja



Grafik 6. Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Kabupaten/Kota, Agustus Tahun 2014

Pada Agustus 2014, tiga kabupaten dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu tertinggi yaitu Sumba Barat Daya (83,58 persen), Sumba Tengah (74,59 persen), dan Manggarai Barat (65,79 persen). Sebaliknya tiga kabupaten dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Manggarai Timur (27,04 persen), Rote Ndao (34,29 persen), dan Ngada (37,48 persen).

4.6. KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. ICLS ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Pada Agustus 2014 dari 2.174.228 orang yang bekerja, sebanyak 78,91 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (1.715.674 orang). Pada periode Februari dan Agustus 2014 tampak adanya penurunan persentase penduduk bekerja di sektor informal, sesuai dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Februari 2014 sebesar 81,35 persen, turun menjadi 78,91 persen pada Agustus 2014, sedangkan persentase sektor formal pada Februari 2014 mencapai 18,65 persen, naik menjadi 21,09 persen pada Agustus 2014. Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sektor formal masih didominasi laki-laki, yaitu 23,98 persen (hampir dua pertiga bagian), sedangkan pada Februari 2014 mencapai 22,84 persen. Pada kelompok perempuan, dari total 941.032 orang yang bekerja, sebanyak 778.176 orang (82,69 persen) bekerja pada sektor informal sedangkan sisanya yaitu 162.856 orang (17,31persen) bekerja pada sektor formal.

Tabel 9. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, Tahun 2014

Kategori Sektor (1)	Februari (2)	Agustus (3)
Total	2.336.212	2.174.228
Laki-laki	1.273.213	1.233.196
Perempuan	1.062.999	941.032
Perkotaan	381.486	357.667
Pedesaan	1.954.726	1.816.561
Formal	435.758	458.554
Laki-laki	290.837	295.698
Perempuan	144.921	162.856
Perkotaan	191.736	208.083
Pedesaan	244.022	250.471
Informal	1.900.454	1.715.674
Laki-laki	982.376	937.498
Perempuan	918.078	778.176
Perkotaan	189.750	149.584
Pedesaan	1.710.704	1.566.090

Tabel 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, Tahun 2014

Kategori Sektor (1)	Februari (2)	Agustus (3)
Total Formal+Informal	100,00	100,00
a. Formal	18,65	21,09
b. Informal	81,35	78,91
Formal	100,00	100,00
a. Laki-laki	66,74	64,48
b. Perempuan	33,26	35,52
c. Perkotaan	44,00	45,38
d. Pedesaan	56,00	54,62
Informal	100,00	100,00
a. Laki-laki	51,69	54,64
b. Perempuan	48,31	45,36
c. Perkotaan	9,98	8,72
d. Pedesaan	90,02	91,28

Pada Agustus 2014 penduduk bekerja pada sektor formal yang tinggal di perkotaan mencapai 45,38 persen. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 yang mencapai 44,00 persen (naik 1,38 poin). Sementara itu, persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal lebih dominan pada daerah pedesaan, dan mengalami peningkatan bila dibanding keadaan Februari 2014, yaitu dari 90,02 persen, naik menjadi 91,28 persen pada Agustus 2014.

5. INDIKATOR PENGANGGURAN

5.1. KILM 8. PENGANGGURAN

Pada Tabel 12, TPT pada Agustus 2014 sebesar 3,26 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di NTT, terdapat sebanyak 3 orang yang masuk kategori penganggur. Pada Agustus 2014 TPT di NTT cenderung mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, seperti terlihat pada Tabel 12, TPT pada Agustus 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,29 poin bila dibandingkan Februari 2014 (1,97 persen).

Tabel 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tahun 2014

TPT	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
NTT	1,97	3,26
Laki-laki	2,24	3,23
Perempuan	1,65	3,30
Perkotaan	5,93	8,05
Pedesaan	1,16	2,25

Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPT pada periode Agustus 2014 bila dibandingkan dengan Februari 2014 terjadi pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki naik sebesar 1,08 poin, sedangkan pada perempuan meningkat sebesar 1,65 poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal pada periode yang sama, kenaikan TPT terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan peningkatan masing-masing sebesar 2,12 poin dan 1,09 poin.

5.2. KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total penganggur;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Pada Agustus 2014 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 11,12 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 11 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 5,71 poin bila dibandingkan dengan Februari 2014 (Tabel 13). Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2014, TPT penduduk umur muda pada laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada laki-laki umur 15–24 tahun lebih banyak yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja daripada perempuan di umur yang sama. Namun pada tahun Agustus 2014, TPT penduduk umur muda laki-laki lebih rendah daripada perempuan.

Mengamati lebih lanjut TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa keadaan TPT umur muda pada Agustus 2014 mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014. Peningkatan TPT pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. TPT umur muda perempuan mengalami peningkatan sebesar 6,00 poin, sedangkan laki-laki sebesar 5,51 poin.

Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan pola TPT daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Pada Agustus 2014, TPT daerah perkotaan mencapai 23,39 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 8,90 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 23 orang yang menganggur, sementara untuk daerah perdesaan sekitar 9 orang.

Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada Agustus 2014 sebesar 6,89 yang dapat diartikan bahwa TPT umur muda enam kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT dewasa. Sejalan dengan peningkatan TPT umur muda pada Agustus 2014 bila dibandingkan dengan Februari 2014, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa juga mengalami peningkatan sebesar 2,13 poin. Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa pada perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki pada Februari, sedangkan pada Agustus 2014 rasionya sedikit lebih tinggi pada laki-laki.

Tabel 12. Indikator Pengangguran Umur Muda di NTT, Tahun 2014

Indikator	Februari	Agustus
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
TPT Penduduk Umur Muda (persen)	5,41	11,12
a. Laki-laki	5,48	10,99
b. Perempuan	5,32	11,32
c. Perkotaan	16,16	23,39
d. Perdesaan	3,49	8,90
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	4,76	6,89
a. Laki-laki	3,94	7,42
b. Perempuan	6,32	6,34
c. Perkotaan	4,27	4,42
d. Perdesaan	6,04	10,81
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur	53,45	58,99
a. Laki-laki	50,63	62,55
b. Perempuan	58,06	54,42
c. Perkotaan	47,26	44,37
d. Perdesaan	59,97	69,92
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penduduk	2,77	4,66
a. Laki-laki	3,20	5,44
b. Perempuan	2,32	3,84
c. Perkotaan	5,47	6,53
d. Perdesaan	1,96	4,10

Dilihat menurut kategori kota-desa maka rasio ini cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah perdesaan baik pada Februari dan Agustus 2014. *Share* penganggur umur muda terhadap total penganggur pada Agustus 2014 cukup tinggi yaitu 58,99 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2014, dari 100 orang penganggur terdapat sejumlah 59 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun. Seperti yang terlihat pada Tabel 13, angka ini mengalami peningkatan sebesar persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2014 (5,54 persen). Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Agustus 2014 sebesar 4,66 persen, hal ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2014 dari 100 penduduk umur muda sebanyak 4 orang diantaranya merupakan penganggur yang berumur 15 sampai 24 tahun. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan angka Februari 2014 (2,77 persen).

5.3. KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, apabila *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Secara umum, pada Agustus 2014, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah tinggi yaitu sebesar 8,49 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 0,49 persen (Tabel 14). Seiring dengan peningkatan TPT periode Agustus 2014 dibandingkan dengan Februari 2014, peningkatan TPT menurut tingkat pendidikan juga terjadi pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tinggi dengan peningkatan masing-masing sebesar 0,66 poin, 1,95 poin dan 3,46 poin. Sementara penurunan TPT terjadi pada kategori tidak pernah sekolah dengan penurunan sebesar 1,34 poin dibandingkan dengan periode yang sama.

Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPT pada tingkat pendidikan sekolah menengah periode Agustus 2014 dibandingkan dengan Februari 2014 tampak lebih tinggi terjadi pada perempuan meningkat sebesar 2,29 poin, sedangkan pada laki-laki meningkat sebesar 1,57 poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa pada tingkat pendidikan dan periode yang sama, terjadi peningkatan baik di daerah perdesaan maupun perkotaan dengan peningkatan masing-masing sebesar 2,01 poin dan 1,82 poin.

Tabel 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
TPT NTT	1,97	3,26
Laki-laki	2,24	3,23
Perempuan	1,65	3,30
Perkotaan	6,34	8,05
Pedesaan	1,62	2,25
Tidak Pernah Sekolah	1,83	0,49
Laki-laki	1,83	0,91
Perempuan	1,83	0,12
Perkotaan	10,45	6,91
Pedesaan	1,40	0,28
SD	0,75	1,41
Laki-laki	1,04	1,61
Perempuan	0,43	1,15
Perkotaan	4,07	4,07
Pedesaan	1,21	1,21
Sekolah Menengah	3,85	5,70
Laki-laki	3,85	5,42
Perempuan	3,85	6,14
Perkotaan	7,04	9,05
Pedesaan	2,43	4,25
Sekolah Tinggi	5,03	8,49
Laki-laki	5,53	6,82
Perempuan	4,40	10,25
Perkotaan	6,57	9,56
Pedesaan	3,41	7,51

Secara keseluruhan pada periode Agustus 2014 bila dibandingkan dengan Februari 2014, peningkatan TPT terbesar terdapat pada mereka yang tingkat pendidikannya sekolah tinggi yang berjenis kelamin perempuan dengan peningkatan sebesar 5,85 persen poin. Sementara itu, mengamati komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang terlihat pada Tabel 15 memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Pada Februari dan Agustus 2014 menunjukkan bahwa persentase penganggur tertinggi pada tingkat pendidikan sekolah menengah.

Pada Agustus 2014, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah menengah mencapai 52,54 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 0,79 poin jika dibandingkan Februari 2014 (51,75 persen). Selama periode Februari dan Agustus 2014, peningkatan persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan terjadi pada tingkat pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah dengan peningkatan masing-masing sebesar 1,26 poin dan 0,79 poin.

Peningkatan persentase penganggur pada tingkat sekolah menengah terjadi baik menurut jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal. Begitu pula peningkatan persentase pada penganggur berpendidikan sekolah tinggi terjadi baik menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal.

Mengamati lebih lanjut Tabel 15, baik pada keadaan Februari dan Agustus 2014 persentase perempuan yang menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Agustus 2014, diantara seluruh penganggur perempuan, yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 30,79 persen, sementara diantara seluruh penganggur laki-laki, yang berpendidikan sekolah tinggi sebesar 16,88 persen.

Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Agustus 2014, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan sekolah dasar lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Tabel 15, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan sekolah dasar sebesar 32,65 persen dan sementara pada perkotaan hanya mencapai 11,09 persen.

<https://ntt.bps.go.id>

Tabel 14. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
TPT	100,00	100,00
Laki-laki	100,00	100,00
Perempuan	100,00	100,00
Perkotaan	100,00	100,00
Pedesaan	100,00	100,00
Tidak Pernah Sekolah	7,85	1,06
Laki-laki	6,48	1,65
Perempuan	10,11	0,30
Perkotaan	4,22	1,11
Pedesaan	8,99	1,02
Sekolah Dasar	22,16	23,42
Laki-laki	26,00	26,75
Perempuan	15,87	19,16
Perkotaan	14,54	11,09
Pedesaan	45,93	32,65
Sekolah Menengah	51,75	52,54
Laki-laki	49,61	54,72
Perempuan	55,25	49,75
Perkotaan	57,28	58,92
Pedesaan	35,57	47,77
Sekolah Tinggi	18,23	22,97
Laki-laki	17,91	16,88
Perempuan	18,77	30,79
Perkotaan	23,95	28,87
Pedesaan	9,51	18,57

5.4. KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Jumlah setengah penganggur di NTT pada Agustus 2014, mencapai 1.063.028 orang (Tabel 16), yang terdiri dari 503.778 orang laki-laki dan sisanya sebanyak 559.250 orang adalah perempuan.

Tabel 15. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur, Tahun 2014

Setengah Penganggur	Februari		Agustus	
	Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	1.134.105	100,00	1.063.028	100,00
a. Laki-laki	502.321	44,29	503.778	47,39
b. Perempuan	631.784	55,71	559.250	52,61
c. Perkotaan	112.493	9,92	76.560	7,20
d. Pedesaan	1.021.612	90,08	986.468	92,80

Pada periode Agustus 2014 dibandingkan dengan Februari 2014 menunjukkan adanya penurunan jumlah setengah penganggur sebanyak 71 ribu orang. Peningkatan jumlah setengah penganggur pada laki-laki yang sebanyak 1,5 ribu orang. Sementara itu, apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, selama periode Februari 2014 dan Agustus 2014 peningkatan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja hanya terjadi di daerah pedesaan. **Pada Agustus 2014 bila dibandingkan dengan Februari 2014, terjadi peningkatan sebesar 1,42 poin di daerah pedesaan, sedangkan di daerah perkotaan terjadi penurunan sebesar 8,06 poin.**

Pada Agustus 2014, persentase setengah penganggur paling tinggi pada tingkat pendidikan sekolah dasar yaitu sebesar 61,39 persen. Dengan kata lain dari 100 orang setengah penganggur 61 orang diantaranya berpendidikan sekolah dasar. Jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2014 terjadi penurunan persentase setengah penganggur pada tingkat sekolah dasar yaitu sebesar 2,03 poin. Penurunan pada tingkat pendidikan sekolah dasar ini diikuti dengan penurunan persentase setengah penganggur baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yaitu masing-masing sebesar 1,79 poin dan 2,10 poin. Berdasarkan klasifikasi wilayah kota-desa penurunan persentase tersebut terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan dengan penurunan masing-masing sebesar 4,61 poin dan 2,69 poin.

Sementara itu, persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Februari 2014. Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2014 sebesar 47,30 persen atau turun 0,29 poin bila dibanding Februari 2014 (47,59 persen). Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa baik pada Februari maupun Agustus 2014, dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 47 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan.

Tabel 16. Indikator Setengah Penganggur, Tahun 2014

Setengah Penganggur	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
Persentase setengah penganggur terhadap total	47,59	47,30
a. Laki-laki	38,57	39,53
b. Perempuan	58,46	57,47
c. Perkotaan	27,74	19,68
d. Pedesaan	51,66	53,08
Persentase setengah penganggur terhadap total	48,54	48,89
a. Laki-laki	39,45	40,85
b. Perempuan	59,43	59,43
c. Perkotaan	29,49	21,41
d. Pedesaan	52,26	54,30

Bila Februari 2014 menjadi acuan, maka persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terlihat meningkat pada Agustus 2014. Pada Februari 2014, dari total penduduk bekerja, sekitar 48,54 persen diantaranya setengah penganggur. Kemudian pada Agustus 2014 naik menjadi sebesar 48,89 persen setengah penganggur dari total penduduk bekerja. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin selama periode Februari 2014 dan Agustus 2014, penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja hanya terdapat pada kelompok laki-laki. Pada Februari 2014, dari seluruh penduduk laki-laki yang bekerja, terdapat sekitar 39,45 persen yang termasuk setengah penganggur, sedangkan pada Agustus 2014, naik menjadi sekitar 40,85 persen. Sementara itu, apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, selama periode Februari 2014 dan Agustus 2014 peningkatan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja hanya terjadi di daerah pedesaan. Pada Agustus 2014 bila dibandingkan dengan Februari 2014, terjadi peningkatan sebesar 2,04 poin di daerah pedesaan, sedangkan di daerah perkotaan terjadi penurunan sebesar 8,08 poin.

Tabel 17. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
Setengah Penganggur	100,00	100,00
Laki-laki	100,00	100,00
Perempuan	100,00	100,00
Perkotaan	100,00	100,00
Pedesaan	100,00	100,00
Tidak Pernah Sekolah	10,18	9,18
Laki-laki	9,17	7,60
Perempuan	10,99	10,60
Perkotaan	2,73	1,49
Pedesaan	11,00	9,78
Sekolah Dasar	63,42	61,39
Laki-laki	62,01	60,22
Perempuan	64,55	62,45
Perkotaan	36,96	32,35
Pedesaan	66,34	63,65
Sekolah Menengah	22,06	25,18
Laki-laki	24,19	27,46
Perempuan	20,38	23,13
Perkotaan	44,16	46,96
Pedesaan	19,63	23,49
Sekolah Tinggi	4,33	4,24
Laki-laki	4,63	4,72
Perempuan	4,09	3,82
Perkotaan	16,16	19,20
Pedesaan	3,03	3,08

5.5. KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, tingkat ketidakaktifan di NTT mencapai 31,09 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di NTT, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 31 orang. Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2014 meningkat jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, dengan peningkatan sebesar 5,13 persen poin. Sejalan dengan peningkatan tingkat ketidakaktifan (Sakernas Februari 2014 dan Agustus 2014).

Tabel 18. Indikator Ketidaktifan (Persen), Tahun 2014

Indikator	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
Tingkat Ketidaktifan	25,96	31,09
a. Laki-laki	17,12	20,00
b. Perempuan	34,40	41,67
c. Perkotaan	38,32	41,69
d. Pedesaan	22,79	28,36

Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidaktifan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja, yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sejumlah 20 orang, sementara untuk perempuan mencapai sejumlah 42 orang. Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Pada Agustus 2014 tingkat ketidaktifan di perkotaan mencapai 41,69 persen, sementara di daerah pedesaan hanya sebesar 28,36 persen. Tingkat ketidaktifan di daerah perkotaan pada Agustus 2014 mengalami peningkatan sebesar 3,37 poin bila dibandingkan keadaan Februari 2014. Begitupun di daerah pedesaan mengalami peningkatan sebesar 5,57 poin, yaitu dari 22,79 persen pada Februari 2014 menjadi 28,36 persen pada Agustus 2014.

6. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat *International Standard Classification of Education (ISCED)*. Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja,

sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja. Pada Agustus 2014, tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Februari 2014. Angkatan kerja pada Agustus 2014 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 61,39 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 25,18 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 4,24 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 9,18 persen (Tabel 20). Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Agustus 2014, persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki (mencapai lebih dari dua kali lipat). Tetapi untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 4,72 persen dibandingkan 3,82 persen.

Tabel 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2014

Tingkat Pendidikan (1)	Februari (2)	Agustus (3)
Setengah Penganggur	100,00	100,00
Laki-laki	100,00	100,00
Perempuan	100,00	100,00
Perkotaan	100,00	100,00
Pedesaan	100,00	100,00
Tidak Pernah Sekolah	10,18	9,18
Laki-laki	9,17	7,60
Perempuan	10,99	10,60
Perkotaan	2,73	1,49
Pedesaan	11,00	9,78
Sekolah Dasar	63,42	61,39
Laki-laki	62,01	60,22
Perempuan	64,55	62,45
Perkotaan	36,96	32,35
Pedesaan	66,34	63,65
Sekolah Menengah	22,06	25,18
Laki-laki	24,19	27,46
Perempuan	20,38	23,13
Perkotaan	44,16	46,96
Pedesaan	19,63	23,49
Sekolah Tinggi	4,33	4,24
Laki-laki	4,63	4,72
Perempuan	4,09	3,82
Perkotaan	16,16	19,20
Pedesaan	3,03	3,08

DATA

MENDERDASKAN BANGSA

<https://ntt.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289, 821755; Fax (0380) 833124
Website : ntt.bps.go.id; Email : bps5300@bps.go.id

ISBN 978-602-70773-9-3



9 786027 077393 >